

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang menghambat kemajuan dan perkembangan manusia secara keseluruhan. Pada dasarnya, kemiskinan mencerminkan kondisi penderitaan dan ketidakberdayaan seseorang, baik karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun karena kurangnya dukungan sosial dari Negara atau masyarakat. (Nurwati, 2008)

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup minimum. Standar hidup minimum ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. (Susanto & Pangesti, 2021)

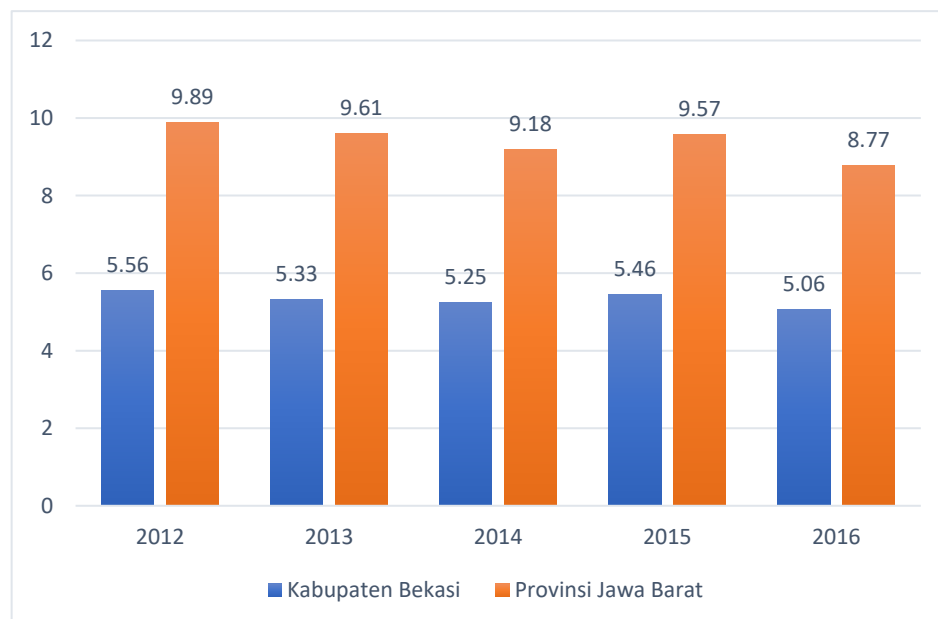
Dalam kurun waktu 2003 hingga 2005, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan dari 17,42 persen menjadi 15,97 persen. Namun, pada tahun 2006, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 17,75 persen. Selanjutnya, dari tahun 2007 hingga 2012, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan dari 16,58 persen menjadi 11,66 persen. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2007, yaitu sekitar 231,6 juta jiwa, dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun fakta yang ironis adalah angka kemiskinan yang cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 37,17 juta jiwa atau sekitar 16,58% dari total penduduk Indonesia. Laporan dari Bank Dunia (World Bank) bahkan menyatakan bahwa hampir setengah dari penduduk Indonesia hidup

dalam kondisi miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 42% rumah tangga hidup dengan pendapatan antara garis kemiskinan US\$1 hingga US\$2 per hari, sehingga banyak rakyat Indonesia yang berada dalam risiko tinggi untuk jatuh ke dalam kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020, jika dibandingkan dengan daerah lain, angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi menempati urutan ke-6 (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan termasuk faktor dari individu, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penyebab kemiskinan menurut laporan dari Bank Dunia. (World Bank, 2020)

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Agustus 2018, terdapat sekitar 413.889 orang yang bekerja di sektor informal di Kabupaten Bekasi. Jumlah pekerja di sektor informal yang lebih banyak dibandingkan sektor formal juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada masalah kemiskinan. Pekerja informal di Kabupaten Bekasi cenderung menggunakan teknologi sederhana karena kurangnya keahlian. Kondisi ini menyebabkan produktivitas individu dan pendapatan menjadi rendah. Salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas individu adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka. Peningkatan pendidikan dan keterampilan akan berdampak positif pada kualitas hidup individu, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian hidup mereka. Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun 2020, terdapat 22.597 jiwa masyarakat yang berada dalam kondisi miskin di

Kabupaten Bekasi. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok disabilitas sebanyak 4.763 jiwa, yang terdiri dari 1.333 jiwa tuna daksa, 778 jiwa tuna netra, 577 jiwa tuna rungu wicara, 343 jiwa tuna grahita, dan 1.734 jiwa disabilitas lainnya.

Kemudian, sebanyak 3.080 jiwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, sedangkan 538 jiwa penyandang disabilitas bekerja. Selain itu, diketahui bahwa mayoritas penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan fisik mereka. Keterbatasan ini seharusnya bisa diakomodasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu penyandang disabilitas.



Tabel 1. 1 Gambar Grafik Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Untuk mengurangi angka kemiskinan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, salah satu langkah yang diambil adalah melalui pemberdayaan melalui tahap pelatihan keterampilan dan pengembangan potensi. Dengan melakukan

pelatihan keterampilan dan menggali potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diharapkan mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi (Hayati & Surya, 2018). Upaya pemberdayaan guna mendorong dan meningkatkan nilai serta kualitas hidup penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk mengembangkan dan menggali potensi yang dimilikinya. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kemandirian yang lebih baik. (Anwar, 2007)

Kabupaten Bekasi memiliki peran utama sebagai salah satu barometer perekonomian nasional, terutama dalam sektor industri pengolahan. Karena adanya potensi industri tersebut, banyak orang cenderung bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari pekerjaan, terutama di kecamatan-kecamatan industri seperti Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Selatan, dan Cibitung (Sulistiyo dkk., 2020). Hal ini terlihat dengan tercirikannya Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri besar berskala nasional/asing dengan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB mencapai 77,79 persen, sehingga baik-buruknya perekonomian Kabupaten Bekasi juga memberikan sinyal terhadap baik-buruknya perekonomian nasional. Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. (Hikmatulloh, 2022)

Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam perekonomian setiap negara di masa kini. Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan suatu negara sering kali dinilai berdasarkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik nasional. Evaluasi program-program di negara-negara dunia ketiga sering dilakukan berdasarkan seberapa tinggi output dan pendapatan nasional yang dapat dicapai (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam konsep ini, ada tiga aspek yang perlu dipahami: pertumbuhan sebagai proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses bertahap dan berkelanjutan yang tidak mencerminkan gambaran perekonomian pada suatu titik waktu tertentu. Untuk memahami pertumbuhan ekonomi dalam konteks output per kapita, perlu mempertimbangkan dua hal: pertama, output total atau Produk Domestik Bruto (GDP) yang dihasilkan oleh suatu negara, dan kedua, jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Dengan memperhatikan kedua faktor ini, kita dapat menganalisis bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh dan bagaimana tingkat kesejahteraan per individu berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama. Aspek jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa kenaikan output per kapita harus diamati dalam periode waktu yang cukup luas. (Kurniawati et al, 2020)

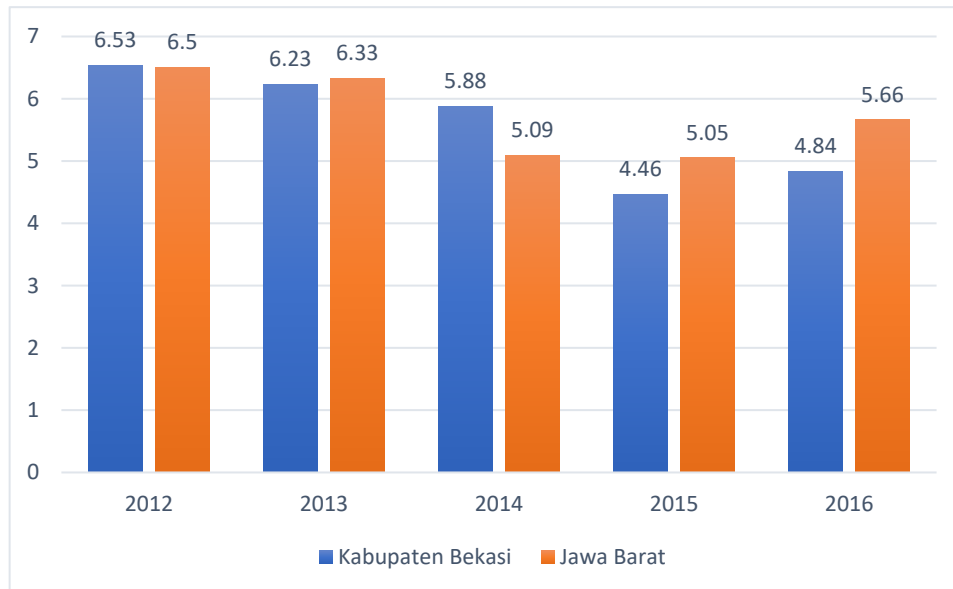
Teori pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya, adalah narasi logis tentang bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini membahas dua hal utama: pertama, faktor-faktor yang menjadi penentu kenaikan output per kapita dalam jangka panjang; dan kedua, bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain

sehingga proses pertumbuhan dapat terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi kondisi penting atau bahkan keharusan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, jumlah penduduk terus bertambah, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. (Didu & Fauzi, 2016)

Selain dari sisi permintaan atau konsumsi, pertumbuhan penduduk juga memerlukan pertumbuhan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, yang berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja, diperlukan peningkatan output agregat atau Produk Domestik Bruto (PDB) secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting atau bahkan suatu keharusan untuk menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahun, kebutuhan konsumsi sehari-hari juga meningkat, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan secara berkala. Selain memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumsi, pertumbuhan penduduk juga memerlukan peningkatan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dengan menyediakan lebih banyak peluang kerja dan sumber pendapatan.



Tabel 1. 2 Gambar Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi Dan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan, tetapi kemudian mengalami penurunan yang signifikan karena dampak dari pandemi global. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan mengalami penurunan, yang menunjukkan kondisi ekonomi di Kabupaten Bekasi tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jika situasi ini tidak diatasi, tren penurunan tersebut dapat terus berlanjut dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi harus diperkuat. Meskipun terdapat tantangan, masih banyak sumber daya yang dapat dikelola secara lebih efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera di masa depan.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh peningkatan kesempatan kerja, dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Untuk memastikan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja terpenuhi, diperlukan peningkatan yang berkelanjutan dalam output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebuah daerah perlu mengalami perubahan untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan. Pembangunan harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik agar tujuan tersebut dapat tercapai dalam kota tersebut. Dalam melakukan pembangunan juga harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan perlu ditetapkannya prioritas agar pembangunan dapat terlaksana sesuai prioritas. Dalam pembangunan hal yang harus diperhatikan terdiri dari pertumbuhan ekonomi didalam daerah tersebut dan upah minimum sebagai tanda kesejahteraan yang dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Untuk mengukur seberapa banyak angka kemiskinan di daerah tersebut, maka diperlukan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang bertujuan untuk menentukan angka kemiskinan yang ada di kabupaten Bekasi.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, kompetitif, maju, dan sejahtera dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan secara berkesinambungan, sehingga setiap tahap mendekati tujuan tersebut (Prima Sukmaraga, 2011).

Suksesnya pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi lebih penting untuk memperhatikan indikator keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merujuk pada proses meningkatkan berbagai pilihan yang tersedia bagi penduduk melalui upaya pemberdayaan, dengan fokus pada peningkatan kemampuan dasar manusia agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan (BPS. 2011).

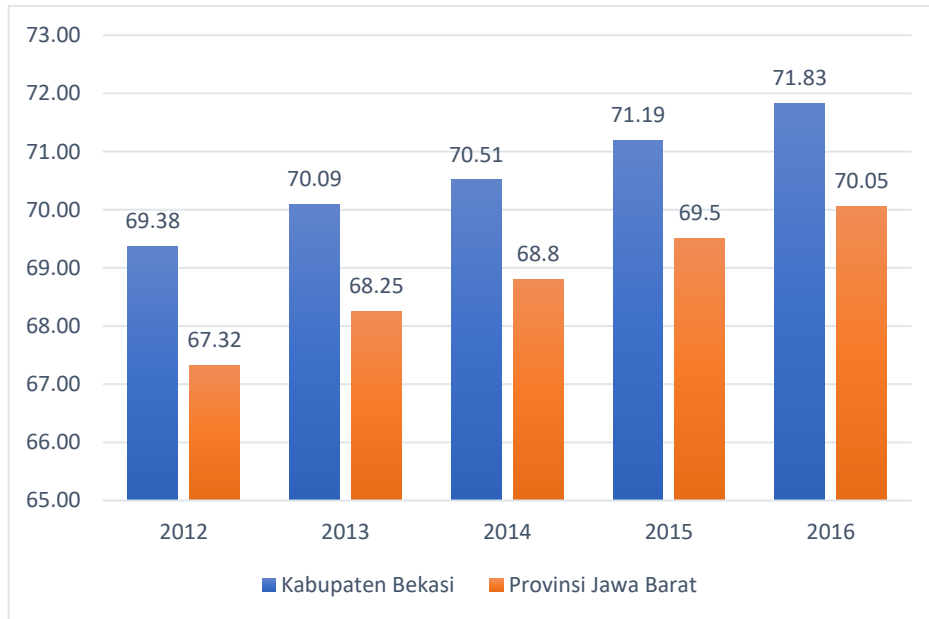
Pembangunan Manusia adalah suatu proses meningkatkan berbagai pilihan yang tersedia dalam meningkatkan kemampuan dasar manusia, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang relevan dalam berbagai bidang pembangunan. Pembangunan manusia menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menilai tingkat pembangunan suatu negara (Putra, 2018).

Pembangunan memiliki hubungan erat dengan sumber daya manusia, karena penciptaan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi yang baik, dan peningkatan keterampilan masyarakat (Dewi et al., 2021).

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pembangunan nasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, upaya pembangunan difokuskan pada daerah yang masih tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, yang

selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam jangka panjang dan pendek.
(Setya dkk., t.t.)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Menurut United Nations Development Program (UNDP), pembangunan manusia adalah proses untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Artinya, pemilihan sektor utama atau sektor yang diutamakan dalam pembangunan nasional dilakukan berdasarkan kemampuan sektor tersebut dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh seluruh bangsa, dan tidak ada satu pun negara di dunia yang terbebas dari masalah kemiskinan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan terus menerus yang menandakan bahwa tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan membaik tiap tahunnya. (Araja dkk., t.t.)



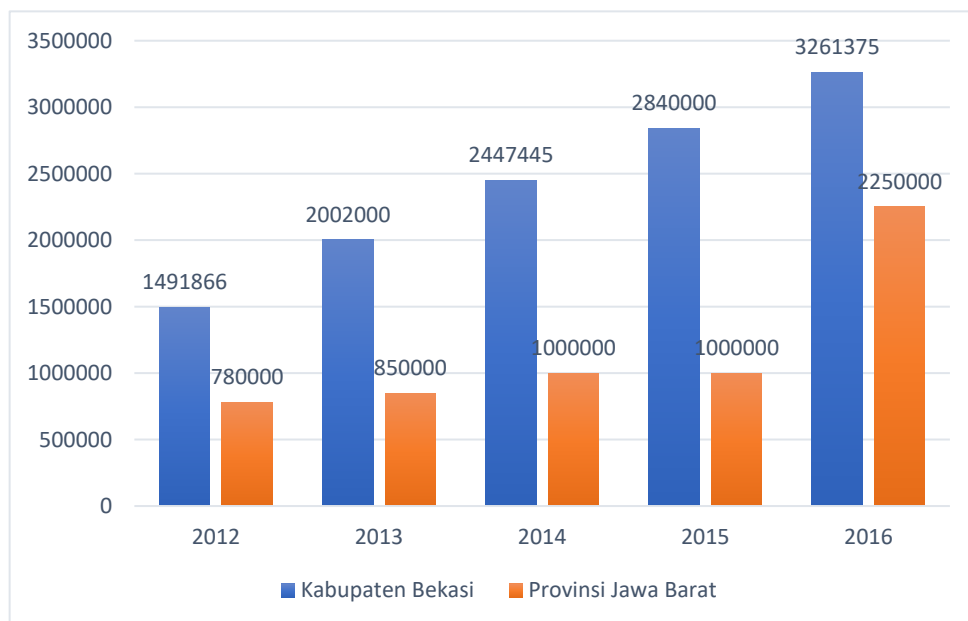
Tabel 1. 3 Gambar Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Upah memiliki peran krusial dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja jika dilihat dari perspektif penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan biasanya ditentukan berdasarkan produktivitas, kualitas, dan jumlah jam kerja dari para tenaga kerja yang bekerja di sana. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang upah minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Upah ini berlaku untuk pekerja lajang dengan pengalaman kerja 0-1 tahun dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Penetapan upah minimum ini dilakukan melalui keputusan gubernur yang berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dan kebijakan ini berlaku selama satu tahun penuh. (N. Gregory Mankiw, 2000)

Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan kenaikan upah minimum. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi para buruh karena dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan adanya kenaikan upah, diharapkan para buruh akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi,

karena mereka menerima gaji yang sesuai dengan standar kebutuhan pekerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8/1981, upah minimum dapat ditetapkan dalam tiga bentuk, yaitu minimum regional, sektoral regional, dan subsektoral. Namun, saat ini, hanya upah minimum regional yang diterapkan di setiap daerah. Secara prinsip, upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, namun peraturan pemerintah hanya secara jelas mengatur upah pokok saja, sedangkan tunjangan tidak termasuk dalam pengaturan tersebut. Kondisi ini sering menyebabkan kontroversi antara pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap ialah jenis tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya tanpa mempertimbangkan tingkat kehadiran atau hasil kerja yang dihasilkan. Contoh tunjangan tetap antara lain tunjangan keluarga yang diberikan secara tetap dan tunjangan berdasarkan senioritas (Pratomo dan Saputra, 2011).



Tabel 1. 4 Gambar Grafik Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

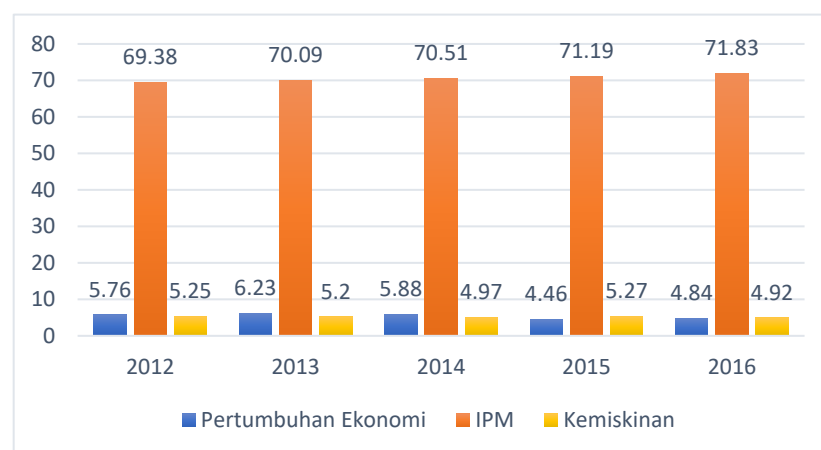
Pada tahun 2013, upah minimum Kabupaten Bekasi berada di angka Rp2.002.000. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp2.441.954 dan tahun 2015, upah minimum Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu Rp2.925.000. Dari tahun 2015-2020 peningkatan upah minimum tiap tahunnya sebesar Rp300.000. Dan pada tahun 2020 upah minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.498.961. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum di Kabupaten Bekasi tetap terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. (BPS, 2021)

Indonesia, sebagai negara berkembang, saat ini sedang menjalani proses pembangunan ekonomi dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor kunci untuk mencapai kemakmuran tersebut adalah ketersediaan kesempatan kerja yang mendukung dan distribusi pendapatan yang adil di seluruh masyarakat. Pembangunan ekonomi pada dasarnya melibatkan serangkaian upaya kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan memastikan distribusi pendapatan yang adil.

Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten terluas pertama di provinsi Jawa Barat (Fajar Hendra Jaya, 2022). Pada tahun 2021, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.936.182 orang berdasarkan data registrasi penduduk dari Dukcapil. Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah tersebut adalah sekitar 2.397 jiwa per kilometer persegi. Salah satu yang dapat membangun perekonomian di suatu daerah adalah upah minimum. Kabupaten Bekasi adalah wilayah yang memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap ekonomi Jawa Barat dan

bahkan tingkat nasional. Wilayah ini memiliki potensi yang signifikan. Secara geografis, kabupaten ini berperan sebagai jalur utama dalam perekonomian, menjadi gerbang masuk menuju ibukota Jakarta. Keletakan strategisnya, berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, berarti wilayah ini mengalami perkembangan pesat dan pertumbuhan penduduk yang cepat. (Sulistiyo dkk., 2020)

Sektor Industri diyakini memiliki akselerasi dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, keunggulan industri dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan membuat percepatan pembangunan industri menjadi tujuan banyak negara. Saat sebuah negara telah berada pada tingkatan dimana sektor industrinya menjadi sektor utama (Leading Sector) maka negara tersebut telah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Proses industrialisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana sektor industri memiliki kontribusi yang meningkat dalam Produk Domestik Bruto, permintaan konsumen, ekspor dan peningkatan kesempatan kerja. (Ekonomi & Bisnis, t.t. 2019)



Tabel 1. 5 Gambar Grafik Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Kemiskinan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi bersifat fluktuasi karena Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten industri yang ada di Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mekenan tingkat kemiskinan Kabupaten Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten Bekasi?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten Bekasi?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini memberikan ruang lingkup masalah yang nantinya penelitian ini menjadi terarah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

Alasan diambilnya objek ini karena pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

1.5 Manfaat

1. Sebagai bahan studi dan informasi tentang Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan di Kabupaten Bekasi yang nanti bisa dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Kemiskinan di Kabupaten Bekasi.